



**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA  
JERUKWANGI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan**

**Oleh**

**Yokebet Mirantino**

**NIM 3301413084**



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 06 September 2017

Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si  
NIP.197707152001122008

Pembimbing Skripsi II



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si  
NIP.197303312005012001

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program studi PKn



Drs. Tijan, M.Si  
NIP.196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Oktober 2017

Penguji Utama



Dr Eko Handoyo, M.Si  
NIP 196406081988031001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si  
NIP.197707152001122008

Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si  
NIP.197303312005012001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Rustono M. Hum  
NIP. 195801271983031003

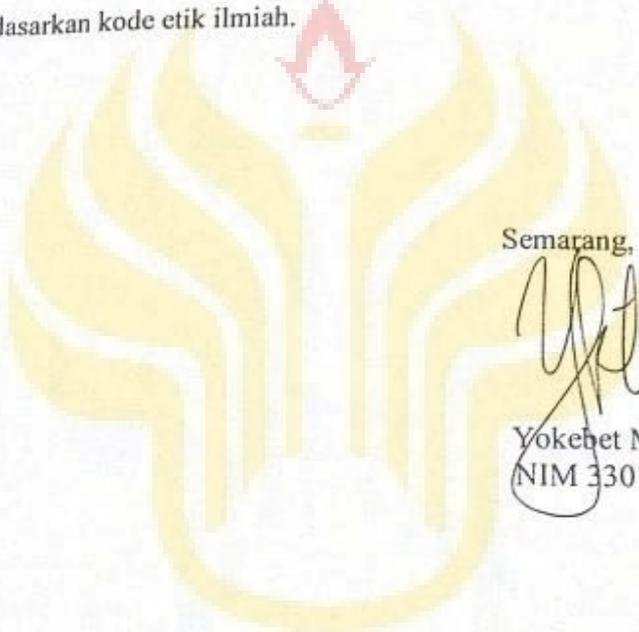
## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2017



Yokebet Mirantino  
NIM 3301413084



# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Kasih tidak pernah menyerah; dan iman, pengharapan, serta kesabaran tidak pernah gagal (Anonim)”.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Mamak yang terkasih untuk setiap doa dan dukungannya
2. Adikku tercinta Eunike Laurensya Agatha yang senantiasa menjadi semangatku
3. Teman kriwulku Lutfi Nahar, Rekna dan teman-teman kontrakan G-Rush Mb Sholi, Mb Mega, Endah, Hilda, Ana, Pipok, Nisa, Iffah, Eva
4. Teman-teman “Gelora Perubahan” BEM KM UNNES 2015
5. Teman-teman Superteam UNNES Night Festival (UNFEST)
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Maha Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Berkat dukungan dari banyak pihak maka skripsi yang berjudul Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I Puji Lestari, S.Pd., M.Si dan Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih, kesabaran dan ketelitian.

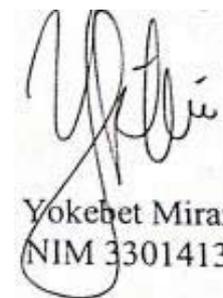
Penghargaan serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam mengikuti kuliah selama ini.
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum, Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Tijan M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan serta izin untuk melaksanakan penelitian.
4. Puji Lestari, S.Pd., M.Si selaku pembimbing pertama yang teliti dan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan motivasi luar biasa sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Dosen dan Staff Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unnes yang memberikan bekal ilmu, inspirasi dan motivasi kepada penulis.
7. Sungadi, S.E selaku Kepala Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang telah memberi kesempatan penelitian kepada penulis.
8. Ketua PKK Desa Jerukwangi, Ketua PKK RW 08, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT), Ketua PKD (Poliklinik) Desa Jerukwangi, Ketua Pengajian Masjid Al Barokah dan Ketua Persekutuan Ibu-ibu GITJ Puring yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis dalam proses penelitian.
9. Faomasi Ziliwu, Ibu Karmiati dan ibu Ristami yang bersedia menjadi informan dan memberikan sejumlah data pendukung penelitian dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun motivasi kepada penulis.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, September 2017



Yokebet Mirantino  
NIM 3301413084

## SARI

**Mirantino, Yokebet. 2017, *Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Puji Lestari,S.Pd.,M.Si, Martien Herna Susanti,S.Sos,M.Si.179 halaman**

### **Kata kunci : Partisipasi, perempuan, pembangunan desa**

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa meliputi pembangunan secara fisik dan non fisik. Pembangunan yang melibatkan seluruh warga masyarakat dapat dicirikan sebagai pembangunan partisipatif. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, serta untuk mengetahui faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, 2) Faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) partisipasi perempuan Desa Jerukwangi diwujudkan dalam bentuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi perempuan seperti PKK, Kelompok Pengajian, Persekutuan Ibu-ibu Gereja, Posyandu serta organisasi Kelompok Wanita Tani, 2) faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor pendorong berupa kegiatan yang menarik yakni dengan apresiasi hadiah dalam setiap kegiatan organisasi dan dukungan dari pemerintah Desa Jerukwangi dan semangat berorganisasi yang mulai tumbuh kembali. Sedangkan faktor penghambat partisipasi perempuan Desa Jerukwangi dalam pembangunan desa adalah kurangnya motivasi untuk mengikuti kegiatan, budaya masyarakat Jawa yang memandang perempuan tidak perlu banyak terlibat dalam kegiatan luar rumah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan Desa Jerukwangi.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) bagi Kepala Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, perlu meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan program pembangunan yang dikhususkan untuk perempuan, 2) bagi masyarakat Desa Jerukwangi perlu meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan desa serta melalui perannya dalam organisasi perempuan atau organisasi sejenisnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Batasan Istilah.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Partisipasi .....	14
2.1.1.1 Pengertian Partisipasi .....	14
2.1.1.2 Faktor yang Memengaruhi Partisipasi .....	15
2.1.2 Perempuan .....	16
2.1.2.1 Perempuan dalam Perspektif Gender .....	16
2.1.2.2 Perempuan dalam Kajian Feminisme.....	20
2.1.2.3 Perempuan Dalam Masyarakat Jawa.....	30
2.1.3 Pembangunan Desa .....	34
2.1.3.1 Pengertian Pembangunan Desa .....	34

2.1.3.2 Strategi Pembangunan Desa .....	35
2.1.3.3 Tujuan Pembangunan Desa .....	36
2.1.3.4 Prinsip Pembangunan Desa .....	37
2.1.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa .....	38
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	43
2.3 Kerangka Berpikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Latar Penelitian .....	50
3.2 Fokus Penelitian .....	50
3.2.1 Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa .....	51
3.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa .....	51
3.3 Sumber Data .....	52
3.3.1 Sumber Data Primer .....	52
3.3.2 Sumber Data Sekunder .....	53
3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5 Uji Validitas Data .....	57
3.6 Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	63
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	63
4.1.1.1 Kondisi Geografis .....	63
4.1.1.2 Kondisi Demografi .....	65
4.1.1.3 Kondisi Perekonomian Desa .....	67
4.1.1.4 Kondisi Sosial Budaya Desa .....	68
4.1.1.4.1 Pendidikan .....	68
4.1.1.4.2 Agama .....	71
4.1.1.5 Program Pembangunan Desa Jerukwangi .....	72
4.1.1.6 Organisasi Sosial Perempuan Desa Jerukwangi .....	74
4.1.2 Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi .....	86
4.1.3 Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi .....	90
4.2 Pembahasan .....	95
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
5.1 Simpulan.....	101

5.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	46
Gambar 2.2. Teknik Analisis Data Miler and Huberman.....	59
Gambar 4.1. Peta Desa Jerukwangi.....	60
Gambar 4.2. Pembangunan Fisik Pemerintahan Desa Jerukwangi.....	68
Gambar 4.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jerukwangi.....	69
Gambar 4.4. Pertemuan Rutin PKK Desa Jerukwangi .....	73
Gambar 4.5. Peringatan Hari Kartini PKK Desa Jerukwangi.....	74
Gambar 4.6. Kegiatan PKK RW 08 .....	76
Gambar 4.7. Penanaman Bibit Cabai .....	77
Gambar 4.8. Kegiatan Organisasi Agama Kristen .....	79
Gambar 4.9. Kegiatan Pengajian Organisasi Masjid Al-Barokah.....	81
Gambar 4.10. Sosialisasi Gizi Ibu Hamil.....	82
Gambar 4.11. Paduan Suara PKK RW 08 Dalam Kegiatan Desa .....	83
Gambar 4.12. Kepala Desa Berpartisipasi Dalam Kegiatan PKK .....	84
Gambar 4.13. Perwakilan Perempuan Dalam Rapat ADD .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian yang Relevan .....	43
Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Jerukwangi Tahun 2011-2013 .....	61
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	62
Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Jerukwangi .....	63
Tabel 4.4. Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013 .....	67
Tabel 4.5. Perkembangan Penduduk Desa Jerukwangi Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2011-2013 .....	65
Tabel 4.6. Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah Tahun 2011-2013 ..	67
Tabel 4.7. Lembaga Kemasyarakatan Desa Jerukwangi.....	70
Tabel 4.8. Nama Perangkat Desa Jerukwangi.....	71
Tabel 4.9. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jerukwangi .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing .....	108
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian .....	111
Lampiran 4. Instrumen Penelitian .....	112
Lampiran 5. Pedoman Wawancara .....	130
Lampiran 6. Hasil Observasi Kegiatan Organisasi Perempuan .....	136
Lampiran 7. Rekap Hasil Wawancara.....	139
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian .....	161
Lampiran 9. Data Pengurus Organisasi Desa Jerukwangi .....	162
Lampiran 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jerukwangi.	164
Lampiran 11. Program Kerja PKK RW 08 .....	165
Lampiran 12. Surat Keputusan Organisasi Perempuan Desa Jerukwangi ....	166



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi membawa banyak dampak dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam pembangunan. Beberapa tahun terakhir, di Indonesia mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah semakin gencar melaksanakan program pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan jalan tol, perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur lainnya mulai digerakkan di tingkat nasional maupun regional. Pembangunan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material (Soekanto, 2012:358).

Setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada lingkup pembangunan fisik seperti pembangunan fasilitas umum berupa rumah sakit, jalan tol, dan sekolah tetapi pembangunan juga mencakup pembangunan secara non fisik yakni dimaknai sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Munandar,2002:13).

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana kemajuan

pembangunan yang ada di wilayahnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 81 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa secara gotong royong.

Pembangunan yang melibatkan seluruh warga masyarakat dapat dicirikan sebagai pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia (Permendagri No 66 Tahun 2007 Pasal 1).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan serta keterlibatan individu untuk menentukan orientasi dan kebutuhan dirinya sendiri. Dalam perspektif kebijakan pembangunan daerah, yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan daerah, dan bukan sebatas dengar pendapat atau konsultasi semata (Rohman,dkk.,2012:59).

Salah satu pendekatan dalam Ilmu Politik yakni pendekatan perilaku juga menempatkan pembangunan masyarakat desa dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku adalah pandangan bahwa manusia dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya saling berinteraksi, saling bergantung, dan semua bagian bekerjasama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu

(Budiardjo, 2010:26). Sama halnya dengan pembangunan desa yang menjadi suatu sistem dimana terdiri dari pemerintah dan masyarakat yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mendukung pembangunan desa. Sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, pembangunan masyarakat desa juga dikonseptualisasikan sebagai proses konsolidasi berbagai wilayah territorial dan pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi (sosial,kultural,ekonomi maupun politik) ke dalam satu unit yang utuh (Mas'oed, 2008:167).

Pasal 68 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama dan jenis kelamin. Selain itu, konstitusi yang berlaku di Indonesia yakni UUD 1945 juga dengan jelas menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya termasuk bidang pembangunan.

Partisipasi dan status perempuan dalam masyarakat sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh masa lampau, budaya, ideologi, serta praktik dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi alasan mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat mengalami kelemahan terutama partisipasi politik di daerah pedesaan dimana pemikiran masyarakat serta pandangan tentang partisipasi masih sangat sempit.

Melihat aturan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, ternyata bangsa Indonesia telah secara sadar menempatkan hak warga negara secara selaras-serasi-seimbang, dalam arti hak perempuan diposisikan sama dengan kaum laki-laki, namun demikian meskipun kedudukan perempuan disamakan dengan laki-laki, dalam praktiknya hak perempuan tidak dapat dipenuhi secara optimal seperti hak untuk terlibat dalam pemerintahan desa atau dengan kata lain menjadi perangkat Desa Jerukwangi dan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Jerukwangi.

Permasalahan tentang perempuan seperti hak perempuan, peran dan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pembangunan desa yang dibahas dalam penelitian ini dapat dikaji dalam teori gender dan feminisme. Menurut teori kebudayaan (Ace Suryadi dan Ecep Idris, 2004:42-56) gender merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Sedangkan feminisme dapat dimaknai sebagai gerakan perjuangan feminis atau kaum perempuan demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah (Fakih, 2012:79).

Seiring dengan perkembangan isu global, masyarakat mulai menyadari adanya kesenjangan gender yang diwariskan oleh budaya masyarakat (Suryadi, 2004:57). Kesenjangan gender yang dimaksud adalah berupa pemilahan partisipasi sosial laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari berbagai masalah perempuan yang ada dalam masyarakat, muncullah konsep *Women in Development*. Konsep ini muncul sebagai bentuk

upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Gerakan WID (*Women in Development*) berasumsi bahwa penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dibawa pada nilai-nilai modernisasi yang berorientasi pada produktivitas, efisien, dan rasional seperti negara-negara industri (Handoyo dkk:2007:162).

Pembahasan tentang perempuan dan partisipasi tidak lepas dari gerakan feminisme. Feminisme dapat dipahami sebagai gerakan yang dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta berusaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki (Fakih, 2012:100).

Desa Jerukwangi secara geografis terletak di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Bondo dan Desa Kedungleper. Wilayah Desa Jerukwangi terbagi menjadi tiga dukuh yakni dukuh Puring, Seminding dan Krajan. Desa Jerukwangi terdiri atas masyarakat yang beragam dilihat dari agama, suku, ras dan budaya masyarakat. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh dan petani. Lahan pertanian dan hutan menjadi salah satu potensi unggulan di Desa Jerukwangi.

Secara administratif wilayah Desa Jerukwangi terdiri dari 32 RT, dan 10 RW, meliputi 3 dukuh. Secara Topografi, Desa Jerukwangi semua wilayah tergolong daratan rendah. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Jerukwangi

memiliki variasi ketinggian antara 5 m sampai dengan 20 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 03/RW 08, dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 01/RW 01.

Desa Jerukwangi merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar yakni sebanyak 6.902 jiwa. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2013, penduduk Desa Jerukwangi terdiri dari 3.326 penduduk laki-laki dan 3.576 penduduk perempuan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Jerukwangi mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. Data administrasi desa mencatat peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2013 naik sekitar 0,2 %. Sedangkan jika dilihat dari komposisi usia, penduduk usia produktif Desa Jerukwangi yakni penduduk yang berusia 15-49 tahun mencapai 3.569 jiwa. Terdiri dari 1.713 jiwa penduduk laki-laki usia produktif dan 1.856 jiwa penduduk perempuan usia produktif. Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan komposisi usia dapat diketahui bahwa penduduk perempuan Desa Jerukwangi lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan berdasarkan komposisi atau struktur usia, sebagian besar penduduk Desa tergolong usia produktif dengan jumlah usia produktif penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki usia produktif.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perempuan Desa Jerukwangi secara kuantitas dan usia produktif memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa termasuk dalam bidang pembangunan desa. Akan tetapi, faktanya partisipasi perempuan di Desa

Jerukwangi masih sangat kurang dalam program pembangunan desa dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada partisipasi laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Masyarakat pada umumnya memandang partisipasi dan perempuan terbatas pada urusan rumah tangga dan pendidikan anak sedangkan dalam hal politik dan pembangunan adalah bagian laki-laki. Sebagai salah satu contoh, tidak adanya keterwakilan perempuan yang menjadi perangkat Desa Jerukwangi serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa belum dapat terwujud dengan baik.

Menurut Sungadi, Kepala Desa Jerukwangi, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, data Desa Jerukwangi menunjukkan bahwa baik perangkat desa maupun anggota BPD Desa Jerukwangi tidak ada keterwakilan di dalamnya. Konstruksi sosial masyarakat Desa Jerukwangi yang cenderung mendasarkan pada sistem patriarki dan pemahaman bahwa perempuan memiliki tugas utama mengurus rumah tangga dan tidak perlu banyak terlibat dalam kegiatan politik termasuk dalam pembangunan desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa (wawancara, tanggal 09 Mei 2017).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jerukwangi tahun 2015-2020 menyebutkan beberapa visi tentang pembangunan desa diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, program

pemberdayaan perempuan yang meliputi pelatihan kader Posyandu, PKK, Karangtaruna dan Wanita Tani, PNPM, pembinaan peran serta perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Namun jika melihat kenyataan di lapangan, partisipasi perempuan di Desa Jerukwangi belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai misi pemerintah Desa Jerukwangi. Hanya ada sebagian kecil kaum perempuan yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi sedangkan sebagian lainnya memilih untuk melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khabib Mahadi tentang “Gender dalam Pandangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Demung Wetan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), yang ditulis pada tahun 2014, menyimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam pandangan santri dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni santri golongan konservatif atau golongan yang tidak setuju dengan konsep kesetaraan gender dan golongan progresif atau golongan yang setuju dengan konsep kesetaraan gender meskipun tidak secara keseluruhan dan mempunyai batasan-batasan tertentu.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mardiana Asmara Dewi membahas tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang” yang ditulis pada tahun 2016. Menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan pendekatan seperti melalui kegiatan keagamaan. Selain itu, pemerintah desa juga harus lebih mengembangkan program-program pembangunan desa.

Dari kedua penelitian tersebut, memberikan dukungan empiris tentang kajian perempuan dilihat dari perspektif gender dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Secara sistematis, kajian ini membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan. Bentuk partisipasi perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi melalui organisasi perempuan yang ada di Desa Jerukwangi. Berdasarkan penelitan tersebut, maka peneliti tertarik membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul “Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.”

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baru secara umum tentang perempuan dilihat dari kajian teori gender, teori feminisme, dan teori kebudayaan masyarakat Jawa serta teori partisipasi dan teori pembangunan. Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat teori dapat dijadikan referensi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru tentang konsep feminisme, gender, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

###### **b. Bagi Pemerintah Desa Jerukwangi**

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pembangunan desa, dan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa

akan pentingnya partisipasi perempuan dalam rangka menyukseskan program pembangunan desa.

c. Bagi Masyarakat Desa Jerukwangi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan atau program pembangunan desa di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara serta meningkatkan kesadaran partisipasi perempuan dalam program pembangunan desa.

d. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian dan referensi, serta menambah ilmu pengetahuan tentang konsep gender, feminisme, perempuan dalam perspektif masyarakat Jawa dan partisipasi perempuan serta pembangunan desa.

## 1.5 Batasan Istilah

Sebagai upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan istilahnya yaitu :

### 1.5.1 Perempuan

Perempuan adalah orang (manusia) yang memiliki kodrat. Kodrat dapat dipahami sebagai perbedaan yang mendasar dan hakiki yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti fungsi reproduksi, hamil, menyusui, dan menstruasi (Oakley dalam Fakih 1997).

Selain dilihat dari ciri fisik, hal lain yang membedakan perempuan dengan laki-laki adalah sifatnya. Perempuan dapat dipahami sebagai individu yang memiliki sifat lembut, penyanyang dan halus. Sedangkan laki-laki cenderung memiliki sifat agresif, kuat, dan tegas.

Berdasarkan definisi diatas perempuan yang menjadi fokus penelitian adalah perempuan yang aktif dalam kegiatan organisasi seperti BPD, PKK, Posyandu, organisasi keagamaan serta organisasi perempuan lainnya yang ada di Desa Jerukwangi.

#### 1.5.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita dalam Supriyanto, 2016:23).

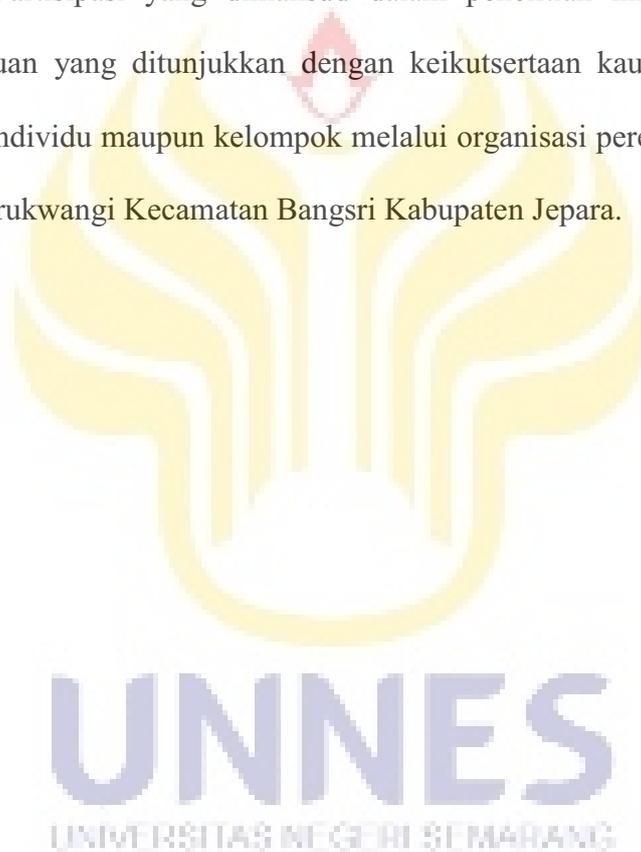
Pembangunan desa adalah pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang merupakan titik sentral dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta kesadaran dan tanggungjawab agar tercipta daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan pengertian diatas, pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik yang ditekankan pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya yang dimaksud adalah kualitas sumber daya perempuan berkaitan dengan partisipasinya dalam pembangunan desa.

### 1.5.3 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi perempuan yang ditunjukkan dengan keikutsertaan kaum perempuan baik secara individu maupun kelompok melalui organisasi perempuan yang ada di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Partisipasi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Partisipasi**

Menurut Sastrodipoetra dalam Safi'I (2008:74) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Selain itu pengertian pembangunan menurut Koentjaraningrat dalam Safi'I (2008:74) mengandung dua pengertian antara lain : (i) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus, (ii) partisipasi sebagai individu di luar aktivitas dalam pembangunan.

Partisipasi secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dan mental atau emosional. Keterlibatan mental dan emosional seseorang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya dengan tujuan mendukung keberhasilan pembangunan sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan rasa memiliki dan ikut menyumbang serta bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

### 2.1.1.2 Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Menurut Holil (1980:9-10) dalam Saca Firmasyah (2009) unsur-unsur yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

- a. kepercayaan dari masyarakat
- b. solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- c. tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
- d. kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri
- e. prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
- f. kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat
- g. organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha
- h. musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan
- i. kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat

selain faktor-faktor yang disebutkan diatas, menurut Holil (1980: 10) juga mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar atau yang berasal dari lingkungan, yaitu:

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bang sayang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

## 2.1.2 Perempuan

### 2.1.2.1 Perempuan dalam Perspektif Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada partisipasi-partisipasi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional).

Gender sendiri dapat dipahami sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal memiliki pribadi yang

lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Narwoko, 2010:47).

Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut (Moore, 1994:10 dalam Kodiran dkk, 2001:3). Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan bisa dianggap feminin dalam budaya lain.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Namun gender berkaitan dengan proses keyakinan bahwa bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, serta dengan ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan sebagai pembedaan peran, fungsi, tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial budaya, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Pembedaan gender dengan pemilahan sifat, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-

laki. Masyarakat belum memahami bahwa gender merupakan suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi dan tanggungjawab sosial antara laki-laki dan perempuan, karena masyarakat mengartikan gender sebagai perbedaan jenis kelamin. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggungjawab sehingga terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. Model sosial ketidaksetaraan perempuan telah digarisbawahi oleh Michelle Rosaldo. Dia mendefinisikan ketidaksetaraan sebagai sebuah kondisi perempuan secara universal di bawah laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Partisipasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik tidak hanya memberikan kenaikan otoritas laki-laki atas perempuan secara universal, namun juga penilaian yang lebih tinggi terhadap peran laki-laki dibandingkan perempuan (Rosaldo dan Lamphere 1974 dalam Astuti, 2011:81).

Kesetaraan dan keadilan gender dapat diartikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan kemampuan untuk menyumbang dan berperan dalam pembangunan baik politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kesehatan, dan lainnya, maka kesetaraan gender merupakan

penilaian setara yang diberikan masyarakat baik bagi kesamaan maupun perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan bagi berbagai peran yang mereka jalankan (Irwan, 2009:46).

Di dalam konsep gender ada beberapa teori dasar yang menjelaskan tentang gender, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Kodrat Alam

Menurut teori ini, perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin dalam memandang gender. Teori kodrat alam dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Teori Nature

Teori nature memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan.

2) Teori Nurture

Berbeda dengan teori nature, teori nurture lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan (Ace Suryadi dan Ecep Idris 2004:42-56).

b. Teori Kebudayaan

Teori kebudayaan memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya. Menurut teori ini, terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karenakonstruksi budaya, materi atau harta kekayaan. Gender merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran

sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin ini dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatihkan.

#### c. Teori Fungsional Struktural

Menurut teori ini, munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seseorang tidak lagi mengacu pada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan.

#### c. Teori Evolusi

Menurut teori ini, semua yang terjadi di jagad raya tidak berlangsung secara otomatis, tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tetapi pasti, dan berlangsung secara terus menerus tanpa henti (Ace Suryadi dan Ecep Idris 2004:42-56).

#### 2.1.2.2 Perempuan dalam Kajian Feminisme

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Gerakan feminisme bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan sosial.

Feminisme berkembang menjadi beberapa bagian seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme postmodern, feminisme sosialis, feminisme, feminisme anarkis, dan feminisme marxis, dan feminisme sosialis.

#### 1) Feminisme liberal

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada '*kesempatan yang sama dan hak yang sama*' bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena perempuan dalam keadaan terbelakang atau tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan "mereka sendiri." Dengan kata lain, jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri.

Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan diskriminasi akibat ideologi patriarkhi, sebagaimana dipersoalkan oleh feminisme radikal maupun analisis atas struktur 'kelas', politik, ekonomi serta gender

sebagaimana dipermasalahkan oleh gerakan feminis sosialis (Fakih, 2012: 81-83).

Feminisme liberal fokus pada perjuangan hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang diperlihatkan oleh hukum yang ada. Feminisme liberal menentang hukum yang tidak adil dan setara dalam berbagai hal. Karenanya, sistem legislasi yang adil harus dibuat, sehingga semua orang memiliki kesamaan hak. Dalam dunia kerja, feminisme liberal juga menuntut peluang yang sama dengan laki-laki dengan standar upah dan fasilitas yang sama. Dalam dunia politik, feminisme liberal memperoleh gerakan perempuan berhak bersuara/memilih dan dipilih. Pendidikan dasar yang sama juga diperjuangkan kalangan feminisme liberal. Cita-cita masa depan feminisme liberal ialah terbentuknya masyarakat yang baik, setara, adil gender, pemenuhan individual, harga diri, kebaikan moral (Lestari, 2016:7).

Kelemahan feminisme liberal ialah memandang manusia makhluk individual, yang terasing dari sosialnya, yang memiliki hak terpisahkan dari kepentingan atau hak orang lain. Batas-batas antara hak dan kewajiban menjadi sulit di dalam feminisme ini, karena lebih menekankan individu daripada sosial atau individu lainnya (Lestari, 2016:7).

## 2) Feminisme radikal

Para feminis radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis, sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum

perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkhinya. Dengan demikian 'kaum laki-laki' secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Aliran feminisme radikal menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Jaggar, 1977). Bagi mereka, patriarkhi adalah dasar ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privelege* ekonomi (Eisntein, 1979).

Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki (*Stanley and Wise, Breaking Out : Feminist Consciousness and Feminist Research*). Dengan kata lain, bagi gerakan feminisme radikal, revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal : urusan subjektif individu perempuan (Fakih, 2012:84-86).

### 3) Feminisme post modern

Ide Posmo - menurut anggapan mereka - ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Mouffe cenderung mengistimewakan perluasan gagasan politik, dengan maksud menjadikan

gender kurang signifikan untuk model-model kewarganegaraan (Gaus & Kukathas, 2013:650).

#### 4) Feminisme anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan (Lestari, 2016 : 8).

#### 5) Feminisme Marxis

Bagi penganut feminisme marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab masalahnya. Dengan begitu penyelesaiannya pun harus bersifat struktural, yakni hanya dengan melakukan perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional. Perubahan struktur kelas itulah yang mereka sebut sebagai proses revolusi. Setelah revolusi, jaminan persamaan bagi laki-laki dan perempuan belumlah cukup, karena perempuan masih dirugikan oleh tanggungjawab domestik mereka. Oleh karena itu, “kecuali jika urusan rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial, serta urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan publik, maka perempuan tidak akan mencapai kesamaan yang sejati” (Engels). Dari perspektif ini, diyakini bahwa emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan

terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga (Fakih, 2012:88-89).

#### 6) Feminisme Sosialis

Feminis sosialis berpendapat bahwa penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itulah kaum feminis sosialis menolak visi marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya, feminisme tanpa kesadaran juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, analisis patriarki perlu dikombinasikan dengan analisis kelas. Feminisme sosialis juga menganggap bahwa penindasan terhadap kaum perempuan dapat melahirkan kesadaran revolusi, tetapi bukan revolusi model perempuan sebagai jenis kelamin yang diperkenalkan oleh feminis radikal (Fakih, 2012:90).

Menurut Kristeva, subjektivitas perempuan berhubungan dengan waktu yang berulang (*cyclical repetition*) dan waktu monumental (keabadian). Keduanya merupakan cara untuk mengonseptualisasikan waktu berdasarkan *motherhood* dan reproduksi. Ada tiga gelombang feminisme menurut Kristeva yaitu :

- a. Feminis egalitarian yang menuntut hak yang sejajar dengan laki-laki, dengan perkataan lain, hak-haknya untuk memperoleh tempat dalam waktu yang linear, misalnya feminisme liberal dan feminisme marxis.

- b. Generasi kedua adalah yang muncul setelah tahun 1968, yang menekankan perbedaan radikal perempuan dan laki-laki dan menuntut hak perempuan untuk tetap berada di luar waktu linear sejarah dan politik, misalnya feminisme radikal.
- c. Feminisme generasi ketiga adalah yang mendorong eksistensi yang paralel yang menggabungkan ketiga pendekatan feminisme yang memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada tanpa menjadi kehilangan *kefeminisannya*, misalnya, terutama feminisme posmodernisme (Prabasmoro, 2007:40).

Aspek penting dari sumbangan feminisme terhadap teori politik adalah melalui praktik politik feminis. Sebagai gerakan politik, feminisme melibatkan diri dalam politik dengan cara yang signifikan, baik secara praktis maupun teoritis. Feminisme juga dapat dipahami sebagai suatu gerakan yang timbul dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut.

Secara umum, feminisme adalah ideologi kebebasan perempuan dengan pendekatan percaya bahwa kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan karena seksualitasnya. Hakikatnya makna dari feminisme adalah menuntut kebebasan, menuntut persamaan hak, dan keadilan sosial bagi perempuan (Irwan, 2009:38). Beberapa prinsip dasar feminisme adalah :

- a. Bahwa kaum perempuan merupakan kelompok orang istimewa dengan sifat-sifat khususnya, misalnya haid, hamil, melahirkan, menyusui, sebagai ibu dan istri.
- b. Bahwa setiap perempuan harus menjadi penentu apa yang baik baginya dan bersama-sama dengan kaum perempuan lain untuk sampai pada kesadaran kolektif, yaitu apa dan siapa sesungguhnya seorang perempuan itu.
- c. Bahwa perempuan mulai pulih kesadaran dan ketidakpuasan hidupnya bahwa dunia laki-lakilah yang menentukan segala kehidupan perempuan.
- d. Bahwa feminisme bertujuan untuk mengubah semua itu dan membongkar sampai ke akar-akarnya dunia laki-laki. Kekuasaannya yang tidak adil dan kesewenang-wenangannya yang menentukan apa yang dianggap benar untuk kaum perempuan.

Kaum feminis mempunyai paham yang sama bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Persoalannya, feminisme bukanlah suatu gerakan homogeni yang bisa secara mudah diidentifikasi ciri-cirinya. (Fakih, 2012 : 79).

Feminis praktis adalah mereka yang mengurus berbagai kebutuhan praktis perempuan, misalnya mereka yang mengalami kekerasan, ketidakadilan dalam *crisis center*, *shelter*, dan sebagainya.

Advokasi-advokasi telah diberikan untuk perempuan dan anak-anak Indonesia. Fokus penanganan terhadap kebutuhan perempuan dalam kondisi normal seperti kebutuhan kesehatan reproduksi, pencegahan pelecehan seksual, maupun kondisi emergensi seperti terjadinya bencana alam, kerusakan, dampak demonstrasi, konflik dan sebagainya. Sedangkan kalangan feminis akademis adalah mereka yang menulis dan membahasakan berbagai persoalan, kendala-kendala yang dihadapi oleh dua kelompok sebelumnya. Biasanya mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan menulis, memberi pelatihan-pelatihan, penelitian, kajian-kajian dan diskusi ilmiah tentang perempuan, pergerakan perempuan, kesetaraan gender, dan sebagainya. Bagi kalangan ini, menurut Kris (2000: ix) *“perempuan untuk memperjuangkan keinginannya maka mereka harus menulis”*.

Ide-ide yang tertuang dalam tulisan-tulisan yang kemudian dipublish dalam buku dan jurnal di Indonesia cukup banyak. Seperti halnya tulisan lainnya, gagasan atau ide ini masuk dan mudah diakses masyarakat melalui media internet. Internet menjadi wadah yang sangat berpengaruh dalam dasawarsa ini. Melalui tulisan-tulisan, tuangan-tuangan ide, status pada sosial media, gerakan feminisme berkembang dan berjuang menerobos ruang dan waktu bagi pembacanya. Para penulis artikel, novel, bahkan status dalam sosial media pada era sekarang mempengaruhi pembacanya, memberi pemahaman pada khalayak serta memberi opini bagi masyarakat luas. Dalam media,

perempuan diharapkan bukan sebagai objek yang senantiasa dieksploitasi secara lahir, namun peran media disana ialah mencoba mem*blow-up* seluruh potensi perempuan serta peran perempuan yang berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan, baik melalui jalur politik praktis, sosial, ekonomi dan pendidikan. Peran media massa saat ini memang sangat dibutuhkan, sebagai *public information* maupun sebagai sarana sosialisasi. Di sisi lain dibutuhkan adanya porsi yang cukup diberikan kepada perempuan untuk mengekspos gerak dan potensi diri mereka. Beberapa buku, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian kini semakin banyak ditulis dan dipublikasikan. Seiring dengan canggihnya kemajuan teknologi internet dimana semua informasi dapat dengan mudah ter-*share*, media sosial, kecepatan dan ketepatan akses data feminisme di Indonesia juga mengikuti arus internet.

Harapan ke depan berkembangnya feminisme di Indonesia dapat membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Adapun beberapa isu yang menarik dalam “goresan pena” kaum feminis dimasa sekarang, sebagai berikut :

- a. Perempuan dalam politik dan keterwakilan politik perempuan, menjadi tuangan gagasan dan fokus kajian para feminis yang menarik, termasuk bahasan mengenai tidak terpenuhinya kuota 30% dan kepemimpinan untuk perempuan dalam politik.

- b. Perempuan dalam pembangunan; perempuan dalam kemiskinan, kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, perempuan dalam program pembangunan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, akses pendidikan untuk perempuan, penganggaran untuk perempuan, peraturan yang diskriminatif, perempuan dalam kabinet dan sebagainya.
- c. Perempuan dalam ekonomi; isu buruh perempuan, sumber daya perempuan, karier dan rumah tangga, perempuan sebagai agen ekonomi, dan beberapa isu lain.
- d. Perempuan dalam hubungan internasional, isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan buruh perempuan dalam MEA. (Lestari, 2016:17)

Sebagai sebuah gerakan, feminisme membawa perubahan besar dalam bidang hukum, seperti disetujuinya Undang-undang Anti-Diskriminasi Terhadap Perempuan, ternyata tidak mempengaruhi atau mengubah pandangan masyarakat atas posisi kaum perempuan. Semakin terbukanya kesempatan kaum perempuan untuk memasuki berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, ternyata juga tidak serta merta mengubah posisi kaum perempuan di masyarakat.

### 2.1.2.3 Perempuan dalam Masyarakat Jawa

Istilah 3 M bagi perempuan Jawa yakni *masak*, *macak*, dan *manak* menjadi hal yang membudaya di kalangan masyarakat terutama masyarakat

Jawa pada umumnya yang dapat diartikan bahwa seorang perempuan harus bisa merias diri (berdandan) sebagai bentuk perwujudan bakti dan melayani suami sehingga perempuan selalu tampak menarik hati yang akan membuat suami betah tinggal di rumah. Macak memiliki pengertian tidak hanya sekadar mengandung, melahirkan dan menyusui saja, tetapi juga menjaga, memelihara, merawat, dan mendidik anak (Suara Merdeka 1997:IX). Selanjutnya partisipasi ketiga perempuan Jawa adalah masak, mengurus dapur yang memiliki arti bahwa perempuan memiliki tanggungjawab untuk urusan belakang.

Perempuan Jawa pada umumnya tidak banyak terlibat dalam kegiatan politik maupun pembangunan. Budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa secara turun temurun yang memahami bahwa perempuan mempunyai sifat-sifat sebagaimana digambarkan dalam stereotip mengenai kelompoknya yaitu nerima, pasrah, halus, sabar, setia, bakti dan sifat-sifat lain seperti cerdas, kritis, berani menyatakan pendiriannya. Sifat-sifat tersebut merupakan kepribadian perempuan Jawa dan gambaran ideal dari seorang perempuan. Kepribadian itu dibentuk dalam lingkungan masyarakat yang telah dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Kepribadian perempuan Jawa akan tercermin dalam sistem sosialnya, yaitu besifat *conform* atau berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku supaya dapat memenuhi harapan-harapan lingkungannya, meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak selalu sesuai dengan keinginannya.

Budaya Jawa sering dianggap tidak kenal demokrasi. Salah satu sebabnya adalah tradisi kebudayaan Jawa merupakan tradisi kerajaan, tradisi absolutism. Berkenaan dengan kenyataan ini, Kartono K. Partokusumo tokoh yang mempunyai berbagai kegiatan pengkajian mengungkapkan :

“Orang Jawa, tepatnya raja-raja Jawa, hanya kenal satu hal dalam masalah kepemimpinan, yaitu absolutisme. Pengalaman kekuasaan politik orang Jawa dalam sejarah kebudayaannya yang panjang adalah kerajaan. Dan sebagai kepala negara, raja mempunyai wewenang yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Raja adalah pemimpin tertinggi dan kepala negara. Bahkan, ia dianggap sebagai keturunan atau penjelmaan Dewa.” (Handayani, 2004:12)

Masyarakat Jawa yang pada umumnya menganut budaya patriarkhi memandang perempuan cukup melakukan perannya di bawah naungan laki-laki. Perempuan yang berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik atau terlibat dalam penentuan kebijakan pemerintah dipandang sebagai hal yang negatif karena perempuan dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran laki-laki. Misalnya saja perempuan yang memasuki bidang politik mendapat label ambisius dan agresif, sementara laki-laki yang memiliki karakteristik yang sama jarang diberi label demikian.

Di masyarakat banyak pemahaman dan penegasan yang tidak tepat mengenai konstruksi sosial dalam hal ini konsep gender dengan jenis kelamin atau kodrat, yang sesungguhnya adalah konstruksi sosial tetapi dapat dipahami sebagai “kodrat perempuan”. Misalnya sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan

dan keindahan rumah, atau urusan domestik lainnya dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal hal tersebut merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural dalam masyarakat, jadi untuk mengerjakan urusan domestik bukanlah kodrat perempuan melainkan konsep gender yang juga dilakukan oleh laki-laki. Karena pandangan tersebut sudah ada dan banyak diyakini oleh masyarakat maka sejak kecil perempuan sudah diajarkan untuk mengerjakan urusan publik. Pandangan masyarakat tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan individu di dalam masyarakatnya.

Adanya konstruksi sosial dan kultural di dalam masyarakat seperti diatas menjadikan salah satu dari manusia baik laki-laki atau perempuan kedudukannya dianggap lebih rendah dari yang lainnya atau akan terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi ketika ada salah satu pihak (laki-laki maupun perempuan) tertinggal dalam berperan, mengakses, dan melakukan kontrol dalam setiap aspek kehidupan (Astuti, 2011:13).

Beberapa kesenjangan gender terhadap perempuan terjadi dalam bidang hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan-kesenjangan gender tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai macam bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender (*gender inequality*) sendiri adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender (Astuti, 2011:81).

### 2.1.3 Pembangunan Desa

#### 2.1.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2004 Tentang Desa).

Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah disatu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan kepada masyarakat desa (Ahmadi 2001:222 dalam Supriyanto 2016).

Seperti yang tertuang dalam pasal 78 UU No.6 Tahun 20014 tentang Desa bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Waterson (dalam Usman 2012:45) ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan desa yaitu :

- a. Pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*)
- b. Memperluas kesempatan kerja

- c. Intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan
- d. Mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- e. Mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan dan
- f. Membangun kelembagaan dan mampu melakukan koordinasi proyek multisektor.

Berdasarkan definisi diatas pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan baik secara fisik yang berhubungan dengan infrastruktur dan pembangunan non fisik atau pembangunan sumber daya manusia masyarakat desa. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan desa.

#### 2.1.4.2 Strategi Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa dicapai dengan berbagai macam cara termasuk dengan membentuk strategi pembangunan desa. Seperti dikutip dari Kartasasmita (1996 :292-398) ada empat strategi pokok pembangunan perdesaan.

Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini, diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan seperti

teknologi, dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat perdesaan. Upaya yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam perubahan struktur masyarakat perdesaan tradisional ke masyarakat perdesaan yang maju dan mandiri.

Kedua, dalam jangka yang lebih panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan, agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi.

Ketiga, pembangunan prasarana. Dalam pembangunan prasarana perdesaan, keikutsertaan masyarakat desa harus diutamakan. Tidak hanya masyarakat desa yang diikutsertakan dalam pembangunan prasarana tetapi juga harus melibatkan kelembagaan yang ada di desa.

Keempat, meningkatkan pembangunan kelembagaan desa. Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa perlu diperkuat agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar pada pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

#### 2.1.4.3 Tujuan Pembangunan Desa

Adisasmita (2006:22) mengemukakan ada dua macam tujuan pembangunan desa, yakni tujuan jangka panjang dan tujuan jangka

pendek. Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Sedangkan tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Tujuan pengembangan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi. Dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

#### 2.1.4.4 Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dilaksanakan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergi sehingga dapat tercapai pembangunan yang optimal.

Ada tiga prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan desa yaitu :

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berlandaskan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. (Adisasmita, 2006:65).

#### 2.1.5 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran,

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010:46).

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Artinya partisipasi dapat dilakukan melalui perwakilan dalam kelompok atau organisasi.

Pada dasarnya partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan baik individu maupun kelompok melalui organisasi dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian atau tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa.

Sesuai dengan asas demokrasi bahwa setiap individu warga negara diberi kebebasan untuk ikut menentukan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan, baik secara individual maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan politik. Dalam negara demokrasi, seperti halnya Indonesia, prinsip etis yang harus dijadikan landasan dalam melakukan

partisipasi adalah (1) menjaga dan menegakkan pilar bernegara Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika; (2) berbasis hukum, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta tradisi dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh warga masyarakat; (3) berbasis gender, dalam arti negara menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi jabatan publik (politik maupun administratif) serta mempengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik; (4) tidak diskriminatif, dalam arti bahwa negara menjamin setiap warga negara tanpa membedakan suku, etnik, ras, agama, kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik; (5) *goodness*, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasari niat baik untuk berbuat kebaikan bagi kejayaan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara; (6) *non-violence*, dalam arti bahwa sedapat mungkin partisipasi politik warga negara dilaksanakan secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan (Handoyo, 2010:237).

Partisipasi perempuan merupakan hak azasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. dapat dipahami bahwa sebenarnya UUD 1945 telah menjamin persamaan hak

dan kewajiban tiap warga negara termasuk laki-laki dan perempuan. Amanat itu diperkuat dengan pasal 28i ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Munculnya gerakan WID (Women in Development) dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Berdasarkan asumsi tersebut kemudian di Indonesia dibentuk organisasi PKK dan Dharma Wanita. Gencarnya slogan WID membuat perempuan digalang, diaktifkan agar berpartisipasi dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang diubah menurut kebutuhan perempuan. WID tidak memungkinkan melihat posisi marginal perempuan dalam pembangunan. Modernisasi WID mengibaratkan manusia sebagai suatu yang serba modern dan berorientasi pada nilai-nilai modern seperti pendidikan, keluarga kecil sejahtera, beretos pembangunan yang efisien dan produktif, terbuka terhadap informasi dan teknologi dll. Namun selama ini usaha dibidang politik dan struktural tidak ditangani secara serius. Kebijakan keluarga berencana misalnya, masih bertumpu pada perempuan dan menjadikan perempuan sebagai alat kontrol kelahiran. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tentang perempuan itu sendiri seharusnya belum ada, karena program-program “kewanitaan” yang dijalankan selama ini berpusat pada kebijakan yang berasaskan kependudukan dengan menggarisbawahi perempuan dalam terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera demi suksesnya “pembangunan negara” (Handoyo, 2007:164).

Jika WID bertujuan memproses persamaan kaum laki-laki dan perempuan, maka transformasi gender merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem dan struktur yang tidak adil. Dengan demikian transformasi gender merupakan upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan baik struktural maupun personal, kelas, warna kulit dan ekonomi.

Tujuan gerakan transformasi gender tidak hanya memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki, melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Hal tersebut membutuhkan perubahan peran baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini kekuatan bukan berarti mendominasi yang lain. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal, dalam rangka mengontrol hidup dan jasad, juga kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan nonmaterial. Transformasi gender menolak integrasi perempuan (Astuti, 2011:113).

Konsep pembangunan masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu : (1) partisipasi masyarakat dan (2) pengorganisasian masyarakat. Kedua teknik pembangunan ini merupakan proses pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat. Konsep pembangunan juga dapat dipahami sebagai program dan gerakan sosial. Sebagai program, pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan titik berat pada pencapaian tujuan

organisasi, sedangkan pembangunan masyarakat sebagai gerakan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan ideologi (Anwar,2007:1).

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, hal ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu dan kualitas penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Maka dari itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk desa perlu ditingkatkan sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan desa yakni kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi perempuan di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun dalam hal keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi melalui organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa Jerukwangi seperti PKK, Wanita Tani, PNPM dan organisasi keagamaan kaum perempuan khususnya ibu-ibu mulai tumbuh kesadaran berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi yang mendukung program pembangunan desa.

## **2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan**

Guna menunjang ketajaman penelitian, peneliti merasa perlu menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah penelitian-penelitian yang hamper sesuai dengan judul peneliti yaitu Partisipasi Perempuan dalam

Pembangunan Desa di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Kajian dan fokus penelitian-penelitian terdahulu akan dikaitkan seputar feminisme, gender, partisipasi politik perempuan dan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya, penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud terangkum dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.1  
Hasil Penelitian yang relevan

No	Nama Penulis	Judul Karya	Fokus Kajian
1.	Luwes Tri Utami. 2016. Skripsi. Semarang: FIS.UNNES.	Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-Hak Buruh di Kota Semarang.	Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membela hak buruh perempuan melalui perjuangan politik dan nonpolitik, dan kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak buruh perempuan.
2.	Khabib Mahadi. 2014. Skripsi. Semarang: FIS.UNNES	Gender dalam Pandangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Demung Wetan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak).	Pemahaman tentang konsep gender, faktor yg mempengaruhi, dan ketidakadilan gender di lingkungan pondok pesantren
3.	Mardiana Asmara Dewi. 2016. Skripsi. Semarang: FIS. UNNES.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang	Pemanfaatan ruang terbuka hijau oleh masyarakat di kota Semarang serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ruang partisipasi hijau di kota Semarang
4.	Supriyanto. 2016. Skripsi. Semarang: FIS. UNNES.	Peran Tokoh Agama Islam dalam Dinamika Pembangunan Masyarakat di Desa Ketanongeng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	Peran tokoh agama dalam membina, mengarahkan, dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran tokoh agama.
5.	Rini Rinawati, Dedeh Fardiah, Oji Kurniadi. Artikel Jurnal. No 23a/DIKTI/Kep./2004 tgl 4 Juni 2004	Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan Pembangunan	Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif melalui

			pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dayeuh Kolot
6.	Ruslan, Murniati.2010' Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender'. Dalam Jurnal Musawa vol 2 (edisi 1).hal 79-96.	Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender	Konsep gender, kesetaraan gender, sejarah perjuangan kaum perempuan dan upaya-upaya untuk pemerdayaan perempuan.
8.	Siti Maya Sari. Skripsi. 2016. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung	Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015	Persepsi masyarakat tentang partisipasi politik dalam perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015
9.	Anggraeni Munggi Lestari. Skripsi. 2013. Sosant Unnes	Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)	Partisipasi perempuan dalam program pemerintah PNPM Mandiri Perkotaan dengan mengimplemetasikan prinsip pembangunan partisipatif
10.	Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 2 Desember 2010. Listyaningsih. Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten	Tingkat partisipasi perempuan atau keterlibatan perempuan dalam aktivitas pembangunan di Banten
11.	Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 2010. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UNS Surakarta. S Darmadi	Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi Jalan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Partisipasi perempuan dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang aktif dalam organisasi yang ada di Desa Jerukwangi. Sedangkan beberapa penelitian sebelumnya seperti hasil penelitian skripsi Luwes Tri Utami yang berjudul “Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-Hak Buruh di Kota Semarang” lebih fokus pada perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membela hak buruh perempuan melalui gerakan politik dan non politik. Hasil penelitian skripsi Mardiana Asmara Dewi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang” membahas tentang partisipasi masyarakat secara umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, penulis juga mengkaji perempuan dari berbagai perspektif yaitu berdasarkan pandangan teori gender, feminisme dan budaya masyarakat Jawa. Sedangkan dalam penelitian skripsi Khabib Mahadi tentang Gender dalam Pandangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Demung Wetan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak) hanya berfokus pada perspektif atau teori gender.

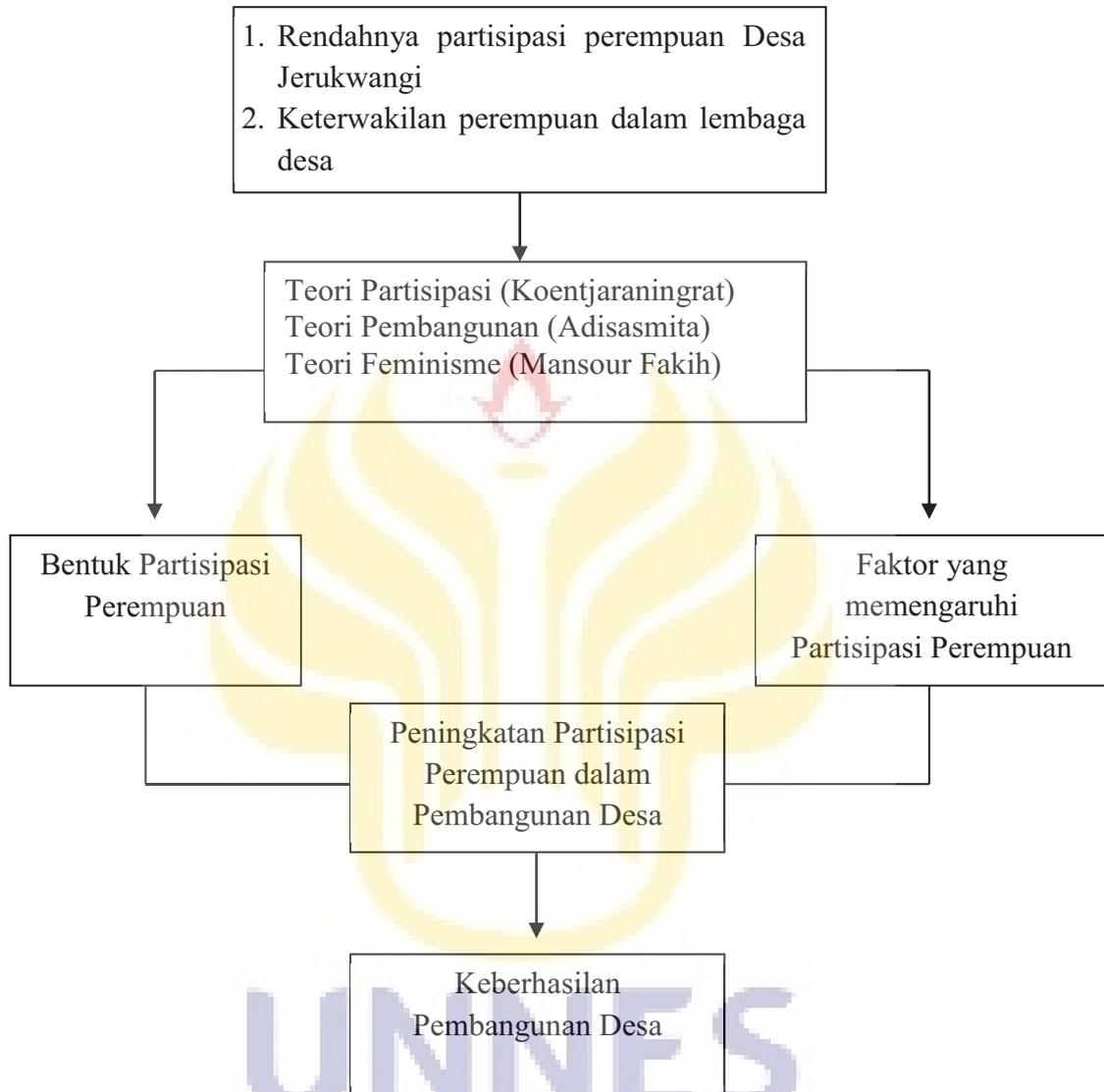
### **2.3 Kerangka Berpikir**

Desa Jerukwangi adalah desa yang memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar merupakan penduduk perempuan yang tergolong usia produktif. Dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif yang besar, memberikan

peluang tinggi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa atau dalam pembangunan desa. Akan tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya. Partisipasi perempuan baik dalam lembaga pemerintahan desa maupun dalam pembangunan desa masih tergolong rendah. Tidak adanya keterwakilan perempuan sebagai pejabat administrasi dan lembaga desa menjadi latar belakang penelitian ini.

Permasalahan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dikaji dengan teori pembangunan desa yang membahas tentang pengertian, tujuan, prinsip, strategi serta pelaksanaan pembangunan desa. Dari kajian teori pembangunan desa dapat diketahui bagaimana seharusnya bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan mengetahui bentuk partisipasi serta faktor yang mempengaruhi diharapkan baik pemerintah desa maupun perempuan Desa Jerukwangi dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa sehingga berdampak pada keberhasilan pembangunan Desa Jerukwangi.

Kerangka berpikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci, variabel-variabel, dan hubungan antar dimensi-dimensi yang disusun untuk membantuk narasi dan grafis, sehingga berdasarkan deskripsi teoritis serta kajian hasil-hasil penelitian yang relevan tentang penelitian ini dapat disusun bentuk kerangka berfikir pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai Perempuan dalam Pembangunan Desa Jerukwangi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Partisipasi perempuan Desa Jerukwangi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni partisipasi secara fisik dan non fisik. Partisipasi fisik ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa Jerukwangi seperti kegiatan 17 Agustus, peringatan hari besar nasional dan Musrengbangdes serta kegiatan-kegiatan organisasi perempuan seperti PKK baik ditingkat desa maupun tingkat RW, Kelompok Wanita Tani, Kader Posyandu, organisasi keagamaan Islam (Pengajian) dan organisasi keagamaan Kristen (Persekutuan Ibu-Ibu Gereja) dan ikut serta dalam kerja bakti, sedangkan partisipasi non fisik diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan seperti sosialisasi dan pelatihan keterampilan.

5.1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi adalah pendidikan, usia, pekerjaan serta lingkungan. Dalam hal pendidikan, perempuan Desa Jerukwangi tergolong rendah karena sebagian besar perempuan Desa Jerukwangi memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP. Oleh karena itu diperlukan adanya pembangunan secara non fisik yang meliputi

kegiatan pelatihan dan pemberdayaan perempuan Desa Jerukwangi. Perempuan Desa Jerukwangi yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan adalah penduduk perempuan usia produktif yakni usia 15-49 tahun. Mayoritas perempuan Desa Jerukwangi berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga yang banyak melakukan kegiatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang menyebabkan perempuan tidak perlu berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi perempuan maupun kegiatan pembangunan desa. Selain itu, lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jerukwangi.

## 5.2 Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah :

- 5.2.1 Bagi Kepala Desa Jerukwangi, perlu meningkatkan program pemberdayaan dan program pembangunan khusus bagi perempuan guna memberikan motivasi dan dorongan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa.
- 5.2.2 Bagi masyarakat, terutama bagi kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung terlaksananya program pembangunan desa dengan terlibat secara aktif dalam pembangunan desa baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.
- 5.2.3 Bagi peneliti lain, hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai jalan pengembangan untuk mengadakan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah,Irwan.2009. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Adisasmita,Rahardjo.2006.*Membangun Desa Partisipatif*.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Astuti, Tri Mahaeni Pudji.2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*.  
Semarang : UNNES PRESS
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko.2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.  
Jakarata : Kencana Media.
- Barowi, dkk. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Budiardjo,Miriam.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka  
Utama
- Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan  
Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Handayani, S Christina, dan Ardhan Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*.  
Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Handoyo, Eko dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang : FIS UNNES.  
\_\_\_\_\_.2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang : Widya  
Karya.
- Hutington P, Samuel dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara  
Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartasasmita, Ginandjar.1996. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta : CIDES.
- Moleong, J. Lexy.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja  
Rosdakarya
- Mosse, Cleves Julia. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar.
- Munandar, Aris.2002.Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial,dan Pemberdayaan  
Masyarakat dalam Jurnal Universitas Paramadina Vol 2, September  
2002:12-24.

- Fakih, Mansour.2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*.Padang :LP2M Padang.
- \_\_\_\_\_.2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : INISTPress.
- \_\_\_\_\_.2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prabasmoro, Priyatna Aquarini. 2007. *Kajian Budaya Feminis*. Yogyakarta & Bandung : Jalasutra.
- Rachman, Maman.2015. *5 Pendekatan Penelitian*. Yogyakarta : Magnum
- Ratih Dewayanti, Erna Ermawati Chotim. 2004. *Marginalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*. Bandung : Yayasan AKATIGA.
- Ross, Murray G., and B.W. Lippin. 1967. *Community Organization: Theory, Principles and Practice. Second Edition*. New York : Harper & Row Publishers
- Sastriyani, Hariti Siti. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Soekanto, Soejono.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono.2015.*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Surbakti, Ramlan.2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Suryadi, A.Idris,E.2004.*Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*.Bandung: PT Ganesindo.
- Suryadi, Budi. 2007.*Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta : IRCiSoD
- Syarbaini,A.Rahman,Monang Djihado. *Sosiologi dan Politik*. 2002.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yaniati, Poppy dan Rully Indrawan.2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Refika Aditama

#### JURNAL

GeoJournal (2006) 67:165. Dominique Masson. Engaging with the politics of downward rescaling : representing women in regional development policymaking in Quebec (Canada)

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 Nomor 3 Edisi September 2015. Stefanus Fransisco. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Marusu Kecamatab Salamantan Kabupaten Bengkayang. Universitas Tanjungpura

Sex Roles (2007) 57:223-234. Oksana Yakusshko. Do Feminist Women Feel Better About Their Lives ? Examining Patterns Identity Development and Women's Subjective Well-being.

#### SKRIPSI

Dewi, Asmara Mardiana. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

Mahadi, Khabib. 2014. Gender dalam Pandangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Demung Wetan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak). Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Supriyanto. 2016. Peran Tokoh Agama Islam dalam Dinamika Pembangunan Masyarakat di Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Utami, Tri Luwes. 2016. Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-Hak Buruh di Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

## UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UNDANG-UNDANG No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Desa Jerukwangi No.2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2015-2020

## WEBSITE

[https://www.researchgate.net/publication/293821955\\_FEMINISME\\_SEBAGAI\\_TEORI\\_DAN\\_GERAKAN\\_SOSIAL\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/293821955_FEMINISME_SEBAGAI_TEORI_DAN_GERAKAN_SOSIAL_DI_INDONESIA) diakses pada 15 Maret 2017 pukul 15.00 WIB

<http://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%20%20%2008110241024.pdf> diakses pada 18 Maret 2017 pukul 14.00 WIB